

KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA FILIPINA DALAM MENANGGULANGI KELOMPOK TERORIS ABU SAYYAF

Ade Nurul Rezky¹
Nim. 1302045237

Abstract

The kidnappings carried out by the Abu Sayyaf terrorist group continued to rise, peaking in 2016. The highest hostage victim experienced by Indonesian citizens of Malaysia Philippines, this encourages President Joko Widodo invite foreign ministers of Malaysia and the Philippines to cooperate in tackling the Abu Sayyaf terrorist group. The purpose of this research is to know the implementation of the trilateral cooperation of Indonesia Malaysia Philippines in counter terrorist of Abu Sayyaf's group in the waters of the three countries. This cooperation has resulted in the agreement contained in the Joint Statement and Joint Declaration, although the realization of this cooperation seems slow but the points of agreement from the cooperation have been implemented in 2017.

Keywords: *Trilateral Cooperation, Tackling Terrorism, Abu Sayyaf*

Pendahuluan

Kelompok Abu Sayyaf sering disebut teroris karena perjuangannya berideologikan Islam garis keras. Tujuan kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjembatani antara pasukan revolusioner, baik di MNLF maupun MILF. Abu Sayyaf mengusung metode perjuangan yang lebih radikal karena para anggota Abu Sayyaf melakukan penculikan warga sipil untuk mendapatkan uang tebusan. Metode yang lantas membuat kelompok tersebut sama-sama ditentang oleh pemerintah Filipina & MILF.

Aksi penculikan yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar untuk mendapatkan banyak pundi-pundi uang yang dipergunakan untuk merekrut anggota-anggota baru dan logistik agar bisa bertahan, dalam hal ini pemerintah Filipina jika dilihat dari sejarah awal pemberontakan oleh kelompok-kelompok separatis di bagian Filipina Selatan, telah melakukan konflik bersenjata antar dua kubu ini selama bertahun-tahun.

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kelompok Abu Sayyaf telah melakukan aktivitas penculikandi daerah perairan perbatasan ketiga negara, penculikan ini tidak hanya dialami negara tetangga yang berdampingan dengan

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ade.nurezky06@gmail.com

Filipina saja (Indonesia dan Malaysia), tetapi juga dialami oleh warga negara Internasional sehingga kasus penculikan ini tidak hanya sebagai suatu permasalahan yang bersifat regional namun juga secara Internasional. Diakui sangat sulit untuk menemukan data yang ril terhadap korban sandera Abu Sayyaf karena informasi yang tidak jelas terhadap adanya penculikan korban sandera akibat lokasi yang berada di daerah perairan perbatasan yang jarang sekali dilalui oleh warga dan aparat pemerintah.

Jumlah korban penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2014 kasus penculikan terdapat 5 korban, naik jadi 6 korban di tahun 2015, naik lagi menjadi 48 korban pada tahun 2016. Dari data pada tabel menunjukkan perbandingan jumlah korban penculikan terhitung sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 telah terjadi peningkatan penyanderaan dan pembajakan yang sangat tinggi terhadap warga negara Indonesia dan Malaysia di tahun 2016 yang merupakan jalur strategis ekonomi bagi ketiga negara dan negara-negara lain untuk memasuki wilayah ASEAN.

Sehingga hal inilah yang menjadi faktor terbentuknya forum pertemuan-pertermuan yang dihadiri oleh ketiga Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi masalah tersebut, diawali pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta yang menghasilkan *Joint Declaration*. Kemudian mereka menginstruksikan instansi terkait dari ketiga negara untuk bertemu sesegera mungkin dan kemudian mengadakan pertemuan secara reguler untuk melaksanakan dan meninjau secara berkala langkah-langkah tersebut dan juga untuk merumuskan prosedur standar operasi. Selanjutnya, pertemuan kembali diadakan sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Manila pada tanggal 20 Juni 2016 dan telah menghasilkan *Joint Statement*. Sehingga *Joint Statement* inilah yang menjadi acuan implementasi dari strategi-strategi yang telah dibentuk oleh ketiga negara dalam forum pertemuan yang telah diadakan demi kesuksesan ketiga negara dalam meminimalisir angka penculikan dan pembajakan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Transnational Organized Crime

Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan bisa disebut bersifat transnasional jika:

1. dilakukan dilebih dari satu negara,
2. persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain,
3. melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, dan
4. berdampak serius pada negara lain.

Bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang lintas antarnegara. Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. Pelakunya tak hanya *nation-state* tapi juga individu dan kelompok juga bisa berperan sebagai “sponsor” tak sekadar sebagai pelaku. Motif dalam melakukan kejahatan ini juga cenderung luas, bukan hanya ekonomi atau politik. Lebih jauh lagi bisa saja kejahatan ini dilakukan tanpa motif apapun. Satu hal yang

perlu digarisbawahi bahwa tipe kejahatan ini cenderung tidak memandang ideologi, suku bangsa atau agama dari pelakunya.

Anggota kelompok kejahatan yang terorganisir dan melewati lintas batas negara merupakan suatu ciri yang tepat untuk mendefinisikan kelompok teroris Abu Sayyaf. Dimana kelompok teroris Abu Sayyaf ini juga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda yang berada di Timur Tengah, kelompok teroris yang berada di Filipina Selatan ini tidak hanya melakukan aksi kejahatan di wilayah internal Filipina saja, tetapi juga menimpa masyarakat Internasional.

Regional Security Complex Theory (RSCT)

Konsep RSTC menjelaskan bagaimana keamanan dibagi berdasarkan regional geografi, yaitu:

1. Concern keamanan tidak berjalan jauh dari aktor, maka dari itu ancaman justru lebih mungkin muncul dari region.
2. Keamanan setiap aktor dalam region berinteraksi dengan keamanan aktor lain. Seringkali terdapat interdependensi keamanan yang intens dalam satu region namun tidak antar region yang kemudian menjelaskan keamanan regional dapat diteorisasikan. Region seharusnya dilihat sebagai sistem mini dimana semua teori dan konsep utama Hubungan Internasional dapat diaplikasikan seperti *balance of power, polarity, interdependency, alliance system* dan lainnya

Teori RSC ini pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan *security management* sebagai tujuan akhir dari usaha-usaha regionalisasi yang berbasis keamanan kawasan. Dalam Teori *Regional Security Complex* dikenal konsep pengaturan keamanan (*security arrangement*), yang didefinisikan sebagai bagaimana suatu negara mengusahakan terciptanya keteraturan dan keamanan kawasan dengan jalan melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangganya di kawasan tersebut. Hal ini dipandang sejalan dengan permasalahan yang terjadi di kawasan perairan antara Indonesia, Malaysia, Filipina dimana kasus perompakan yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf ini akhirnya mendorong ketiga menteri luar negeri masing-masing negara dalam membentuk suatu forum yang membahas mengenai pengaturan keamanan bagi ketiga negara.

Variabel-variabel dalam teori *Regional Security Complex* dapat dibagi menjadi variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal kemudian diukur dengan menggunakan indikator letak geografis, interaksi antar negara, serta kesamaan sistem budaya, ekonomi, sosial dan politik negara-negara kawasan. Sedangkan variabel eksternal akan dilihat dengan memperhatikan kondisi lingkungan internasional di sekitar negara-negara anggota RSC dan isu-isu yang sedang berkembang saat itu.

Konsep Implementasi

Pengertian implementasi secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Menurut Syauckani dkk, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menerangkan kesesuaian fenomena atau peristiwa yang terjadi (Kerjasama Trilateral pemerintah Indonesia Malaysia dan Filipina dalam menanggulangi kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan perbatasan). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau tersier pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode berbasis (buku –buku, jurnal, dan situs internet yang relevan dengan judul penelitian). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*, yaitu pengumpulan data berdasarkan buku-buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisa yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis.

Hasil Penelitian

Dalam implementasi kerjasama trilateral ini memakan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu tahun untuk proses pembuatan strategi kebijakannya sehingga sangat disayangkan, karena jika dilihat bahwa tahun 2016 merupakan kasus dengan tingkat penculikan tertinggi sebanyak 48 sandera jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yaitu di tahun 2015 terdapat 6 sandera dan tahun 2014 terdapat 5 sandera. harusnya kerjasama trilateral ini sudah dapat diterapkan diawal pertemuan sehingga penculikan yang terjadi di perairan perbatasan dapat diatasi dengan cepat dan tanggap.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi dari 7 poin kesepakatan kerjasama tersebut dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dari 7 program kerja tersebut semuanya saling terintegrasi dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari poin-poin kerjasama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera.

Gambaran Umum Sejarah Kelompok Teroris Abu Sayyaf

Untuk mengetahui sejarah lahirnya Kelompok Teroris Abu Sayyaf, perlu diketahui pula sejarah panjang yang melatar belakangi kelompok ekstrimis tersebut yaitu pada saat Islam masuk ke wilayah Filipina bagian Selatan tepatnya pada tahun 1380. Kedatangan saudagar muslim ternyata lebih awal daripada kedatangan kolonial Barat Spanyol, karena Spanyol pertama kali mendaratkan kapal dagangnya tanggal 16 Maret 1521 yang di pimpin oleh Ferdinand de Magelhand.

Pada saat masuknya kolonial Spanyol ke Filipina pada tanggal 16 Maret 1521, penduduk muslim telah melihat adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magelhands. Ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah Utara Filipina tidak banyak perlawanan berarti dari wilayah tersebut. Tetapi ketika mereka berusaha menaklukkan wilayah Selatan Filipina seperti Mindanao, Sulu, Basilan, Cotabato, Lanao Selatan, Lanao del Norte ternyata penduduk muslim melakukan perlawanan dengan gigih dan tanpa henti menyerah, karena didasari oleh semangat *Jihad fi Sabilliah*, dan perlawanan ini berjalan hingga tahun 1876. Kolonial Spanyol menghabiskan waktu tidak kurang 375 tahun untuk melawan dan menaklukkan kelompok muslim Selatan Filipina, namun hal ini umat Islam tetap tidak dapat ditaklukkan, hingga berpindah kekuasaan kolonial Spanyol kepada Amerika pada tahun 1898.

Penjajahan Spanyol bisa dikatakan berhasil menguasai wilayah Utara Filipina, tetapi dapat dikatakan gagal menundukkan wilayah Selatan terutama yang tergabung dalam Kesultanan Mindanao dan Sulu, meski dalam kurun waktu yang cukup lama (375 tahun). Pada saat terjadinya kekalahan dalam perebutan pengaruh dengan koloni Amerika, pada tahun 1898 Spanyol menjual wilayah jajahannya baik di Utara dan Selatan Filipina kepada Amerika seharga USS 20 Juta melalui perjanjian *traktat Paris* yang berisi AS dan Spanyol menyepakati gencatan senjata. Melalui *Traktat Paris* tersebut keduanya menyepakati untuk menghentikan perang. Jajahan Amerika saat mengawali ekspansi dan kolonialisasi di wilayah Selatan Filipina menampilkan gerak langkah seperti bersahabat dan dapat dipercaya akan janji-janjinya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya *traktat Bates* tanggal 20 Agustus 1898, yang isinya Amerika bertekad akan memberikan kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan aspirasi dan meningkat taraf pendidikan bangsa Moro. Namun kenyatannya traktat tersebut hanya dijadikan alat taktis untuk mengambil hati orang muslim agar tidak melakukan pemberontakan dan perlawanan pada koloni Amerika.

Kesultanan Mindanao dan Sulu pada dasarnya tidak terpengaruh dengan penetrasi kolonialisme baik Spanyol maupun Amerika. Namun ironisnya Filipina adalah negara paling lama dijajah Eropa di wilayah Asia Tenggara. Kolonialisasi Spanyol dan Amerika berusaha melakukan integrasi politik formal dengan Filipina Utara dan Selatan dalam banyak aspek seperti bidang sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, hukum dan lainnya. Sedangkan saat memasuki kemerdekaan Filipina dan hilangnya pengaruh kolonialisme ternyata pemerintahan Filipina yang terbentuk berupaya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh koloni Amerika dengan

semboyan *Filipinisasi* dan *Kristenisasi*. Hal inilah yang menyebabkan kegelisahan di kalangan muslim Moro yang berada di Wilayah Selatan Filipina baik di masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

Perjuangan muslim Moro setelah memasuki babak baru Filipina merdeka, secara terorganisir paling awal lahir di tahun 1968 dengan nama *Muslim Independent Movement* (MIM). Gerakan pembebasan muslim Moro MIM lahir sebagai akibat dari tekanan yang semakin berat dari pemerintah Filipina pimpinan presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa dari tahun 1965-1986. Ia seringkali mengeluarkan kebijakan yang cenderung represif dan bertindak otoriter terutama bagi penduduk muslim Moro, di mana kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan Filipina semua terpusat pada satu tangan, Ferdinand Marcos. MIM didirikan oleh seorang politisi muslim Uldog Maltalan. Organisasi ini tidak dapat bertahan lama karena mendapat tekanan dari pemerintah. Kemudian muncul organisasi perjuangan kemerdekaan muslim Moro dengan nama *Moro Liberation Front* (MLF) pada tahun 1971 yang tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih otoriter apalagi pada masa itu di keluarkan kebijakan *Presidential Proclamation* no. 1081 yaitu suatu program yang membangun masyarakat baru, yang dimaksudkan agar warga Filipina tampil menonjol. Sejak saat itu perjuangan muslim Moro terus berbenah, meskipun banyak pula mengalami perubahan-perubahan mendasar karena adanya perbedaan ideologi dan langkah-langkah perjuangan.

Dari organisasi MLF ini lahir pula organisasi perjuangan muslim Moro seperti *Moro national Liberation Front* (MNLF) pimpinan DR. Nur Misuari. Pada tahun 1987, MNLF menerima tawaran dari pemerintah Filipina untuk menjadikan sebagian Pulau Mindanao di Filipina selatan, sebagai daerah otonomi khusus. Daerah otonomi yang dimaksud sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 1990 dengan nama resmi "*Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanaw*" (NRMM; Daerah Otonomi Muslim Mindanao)". Selain itu, MNLF juga menyetujui untuk meletakkan senjata pada perundingan yang difasilitasi oleh pemimpin Libya, Muammar Qadafi di tahun 1976.

Sikap kelompok Modernis seperti MNLF pimpinan Nur Misuari mengindikasikan adanya kemauan untuk belajar dari pengalaman demokrasi yang terus berkembang di berbagai penjuru dunia. MNLF akhirnya memperlunak tuntutan yang semula merdeka menjadi ke arah otonomi bagi wilayah yang didiami mayoritas Muslim terutama Selatan seperti Mindanao, Basilan, Sulu, Palawan, dengan luas geografisnya sekitar 116.895,3 KM². Berbagai kompromi-kompromi politik terus dilakukan di meja perundingan. Pada tanggal 23 Desember 1976 MNLF menandatangani perjanjian Tripoli yang berisi penetapan pembagian administratif otonom untuk umat Islam di Filipina selatan, pembentukan pemerintahan otonom, sistem peradilan untuk hukum Syariah dan pasukan keamanan khusus, dan ketaatan gencatan senjata. Kawasan otonom itu memiliki sistem ekonominya sendiri, termasuk bank syariah yang kemudian disetujui pemerintah Filipina. Perjanjian ini dilakukan empat negara sebagai mediasi dan disaksikan sekjen Konferensi Islam. Namun sayang dalam implementasi perjanjian itu diwarnai aksi pembekuan oleh pemerintah Filipina yang saat itu dipimpin oleh presiden Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos gagal menjalankan Tripoli karena kurangnya komitmen politik dari pemerintah pusat di Malacanang.

Setelah pemerintahan Marcos berakhir tahun 1986, penerusnya yaitu presiden Corazon Aquino mencoba untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Memang jelas dalam pasal X, Bab 15-21 dari undang-undang Filipina (konstitusi) memuat aturan tentang wilayah otonomi. Pada pemerintahan Aquino NRMM "*Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanaw*" (NRMM; Daerah Otonomi Muslim Mindanao) dilaksanakan dengan maksimal. Proses pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1989 dan akhirnya terpilih Nur Misuari (dari MNLF) sebagai Gubernur daerah otonomi wilayah Selatan atau NRMM. Selanjutnya sebagian anggota MNLF yang masih ingin melakukan perjuangan bersenjata lalu membelot dari MNLF & membentuk kelompok baru yang bernama *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) pada tahun 1981 dengan Hashim Salamat sebagai pemimpinnya. Dibandingkan dengan MNLF, MILF cenderung lebih radikal karena memprioritaskan opsi perjuangan bersenjata untuk menggapai tujuannya. MILF juga memiliki cita-cita menjadikan Filipina selatan sebagai negara merdeka yang berbasis hukum Islam.

Nur Misuari dianggap tidak mampu menyampaikan aspirasi mayoritas muslim Moro lantaran telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah Manila, tanpa satupun penyelesaian prinsipil bagi bangsa Moro. Hingga kini, MILF tetap berjuang menghendaki tegaknya negara Islam yang merdeka dan bisa menentukan nasibnya sendiri, meskipun pergerakan MILF dan Abu Sayyaf sama-sama menginginkan berdirinya negara Islam, namun MILF tidaklah se-ekstrim dan radikal seperti Abu Sayyaf. Hingga akhirnya Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya perwakilan MILF & Filipina terlibat dalam perundingan resmi tidak terkecuali kelompok MNLF Nur Misuari. Beberapa kali perundingan antara keduanya sukses menghasilkan kesepakatan damai. Namun beberapa kali pula kesepakatan damai tersebut gagal membawa perdamaian jangka panjang akibat pecahnya kembali aksiaksi kekerasan bersenjata. Lepas dari itu semua, pada tahun 2013 perwakilan MILF & Filipina mengklaim kalau keduanya berhasil merumuskan perjanjian damai yang diharapkan bisa mengakhiri aktivitas pemberontakan MILF secara permanen. Berdasarkan kesepakatan di tahun 2013 tadi, wilayah Filipina selatan akan memperoleh otonomi lebih luas & kebebasan menggunakan hukum Islam. Kesepakatan tersebut juga menjanjikan jatah keuntungan hasil eksploitasi SDA yang lebih besar bagi komunitas setempat. Sebagai gantinya, MILF setuju untuk mengesampingkan ide kemerdekaan Filipina selatan & membiarkan senjatanya dilucuti. Bulan Januari 2014, kesepakatan damai tersebut akhirnya diresmikan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Seiring berjalannya waktu, tahun 1993 lahir pula organisasi pergerakan Muslim moro dari tubuh MILF terpecah belah akibat perbedaan ideologi yang dikenal dengan kelompok Abu Sayyaf (Bapak Pedang). Gerakan kelompok terakhir ini cenderung radikal dan bertindak di luar norma agama Islam karena mengarah pada tindakan ekstrim, apalagi basis perjuangan mereka sengaja berada dalam hutan. Pergerakan kelompok Abu Saayaf (*bapak pedang*) adalah nama sebuah kelompok separatis militer yang berbasis Islam. Basis perjuangannya berada di wilayah Basilan, Mindanao dan Jolo. Kelompok Abu Sayyaf dalam banyak sumber sering disebut

teroris karena perjuangannya berideologikan Islam garis keras. kelompok ini memiliki seorang pimpinan yang dijuluki Khadafi Janjalani.

Tujuan pergerakan Abu Sayyaf ini adalah untuk mendirikan negara Islam MIS (*Islam Mindanao Islamic State*) yang merdeka dan berupaya menerapkan hukum syariah Islam sebagai otoritas moral dari Undang-undang negara. Rommel Banlaoi menjelaskan mengenai “*empat dasar Kebenaran*” yang dideklarasikan oleh Abdurazak Janjalani tahun 1993-1994 sebagai panduan dasar bagi perjuangan kelompok Abu Sayyaf :

1. Tujuan kami tidak untuk membangun atau mempromosikan faksi, dan perpecahan dalam kelompok perjuangan Muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjembatani antara pasukan revolusioner baik di MNLF maupun MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan.
2. Tujuan strategis kami adalah pembentukan sebuah negara Islam murni, yang “*sifat, makna, lambang dan tujuannya*” identik dengan perdamaian. Kelompok Abu Sayyaf menyatakan bahwa mereka akan menghormati kebebasan beragama bahkan dalam konteks negara Islam. Mereka menyatakan “*hak-hak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam*”.
3. Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi “*penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang terhadap umat Islam*”.
4. Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua dibawah naungan hukum Quran yang mulia dan sunnah yang murni, selain itu kelompok Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi. Ketidakadilan dan perampasan hak ekonomi bangsa Moro. Kehadiran mereka juga untuk mencari keadilan bangsa Moro. Tujuan untuk penegakan keadilan akan berakhir dengan sebuah tuntutan untuk mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Moro.

Langkah-langkah yang dilakukan kelompok ini adalah dengan cara merekrut anggota. Kelompok Abu Sayyaf mendekati dan merekrut pemuda-pemuda Islam yang tidak sejalan dengan kelompok MNLF. Awalnya kelompok ini hanya berjumlah 500 orang. Walaupun hanya sedikit kelompok ini dalam gerakannya cenderung radikal dan mampu menggoyahkan kedaulatan negara Filipina. Secara umum pandangan kelompok Abu Sayyaf tentang sejarah mengikuti proses linier risalah (*kenabian*) dengan “*ulama*”. Kelompok ini mencoba membuat garis pemisah antara *haq* (kebenaran) dengan yang terlarang (*haram*), muslim dengan *kafir* (orang yang mengingkari Allah). Konsep tentang keadilan juga didasarkan pada konsep *qishas* (pembalasan) dan ia berpendapat bahwa *Jihad* (perang melawan musuh) sebagai cara yang tepat untuk meminimalisir tekanan pemerintah Filipina di Mindanao dan wilayah lain di Filipina Selatan.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf

Berikut ini dapat kita lihat ancaman internal terorisme yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina yang dimulai pada tahun 1991, terjadi pengeboman MV Doulos di Zamboanga City yang menewaskan 37 korban jiwa. Kemudian pada Desember 1994, kelompok Abu Sayyaf melakukan pemboman pesawat Philippines Airlines jurusan Manila-Tokyo dan menewaskan seorang penumpang, serangan ASG yang terbesar adalah serangan di kota Ipil di Mindanao pada bulan April 1995, dilanjutkan pada 1998, terjadi serangan granat ke sebuah pusat perbelanjaan di Zamboanga yang mencederai 60 orang, serangan pada April 2000 yang menewaskan 21 orang termasuk 10 turis barat di sebuah tempat wisata di Malaysia, pada Mei 2001 serangan ASG menewaskan 3 orang penduduk AS dan 17 orang Filipina di sebuah tempat wisata di Palawan Filipina, termasuk beberapa wisatawan asing mengalami cedera, pada bulan oktober 2002, ASG meledakkan bom di dekat markas militer Filipina di Zamboanga dan menewaskan seorang staf AS. Pada Februari 2004, Khadaffy Janjalani mengebom SuperFerry 14 di Teluk Manila dan menewaskan 132 orang, pada Maret 2004, pemerintah Filipina menahan seorang anggota ASG yang melakukan pengeboman dengan target termasuk kedutaan AS di Manila, selain itu, ASG juga mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di Manila, Davao dan General Santos pada hari valentine 2005 yang menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya.

Pada bulan November 2007 sebuah bom motor yang meledak di luar gedung kongres Filipina menewaskan seorang anggota kongres dan tiga staf lainnya, dan pada bulan Januari 2009, ASG membunuh tiga anggota palang merah internasional di Provinsi Sulu. Selama enam bulan pertama 2016, Abu Sayyaf dilaporkan melaksanakan 32 aksi pemboman, meningkat 68 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 11 April 2017, terjadi pertempuran terhadap kelompok Abu Sayyaf di pulau wisata Bohol, Filipina yang menewaskan 5 orang warga sipil dan seorang polisi Filipina.

Ancaman kejahatan kelompok Abu Sayyaf tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat Filipina saja, tetapi juga dirasakan oleh warga negara lain yang melintasi perairan Sulu yang merupakan perairan perbatasan yang strategis antara ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina bagi kapal-kapal dari negara lain yang melakukan aktivitas perekonomiannya. Hal ini tentu dirasa sangat berat bagi negara-negara lainnya yang terus mengalami kasus penculikan secara berulang-ulang, selain materi, penculikan ini juga mengancam keselamatan korban yang tidak segera menebus tuntutan tersebut dengan cara memenggal kepala korbannya.

Upaya Pemerintah Filipina dalam mengatasi ancaman kelompok Abu Sayyaf

1. Upaya Internal

Semakin tingginya ancaman keselamatan dan meningkatnya kerugian materi yang dihadapi oleh Pemerintah Filipina baik bagi warga negaranya maupun warga negara lain, hal ini mendorong Filipina untuk mengambil langkah upaya internal dalam negaranya mengatasi aksi kejahatan kelompok Abu Sayyaf yang

semakin meresahkan masyarakat Filipina itu sendiri. Berikut ini terdapat beberapa upaya internal dari pemerintah Filipina dalam menangani kasus-kasus aksi terorisme di negaranya, yaitu :*Human Security Act* 2007 Pada 6 Maret 2007, Presiden Gloria Macapagal Arroyo menandatangani undang-undang *nasional Republic Act 9372* atau disebut dengan *Human Security Act* 2007 (HSA 2007) mengenai tindak kejahatan terorisme di Filipina, dan mulai berlaku pada 15 Juli 2007. HSA memberikan otoritas yang lebih luas kepada para penegak hukum dalam hal penahanan, pengejaran langsung ke rumah-rumah, pencarian bukti-bukti, tetapi di sisi lain, HSA juga menekan potensi penindasan yang tidak seharusnya dilakukan dengan cara secara eksplisit memberikan perlindungan-perlindungan yang signifikan kepada terduga pelanggar hukum dan juga saksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Selain itu terdapat juga *Armed Forces of Philippines Internal Peace and Security Plan Armed Forces of Philippines* (AFP) adalah pasukan militer nasional Filipina yang telah terbentuk sejak tahun 1935. Menurut *Republic Act* No. 8551 tanggung jawab terhadap keamanan internal dialihkan kepada *Departement of National Defense* (DND) dan *Armed Forces of Philippine* (AFP) militer Filipina sendiri telah mengeluarkan *AFP Internal Peace and Security Plan 175* (AFP IPSP) untuk masa periode 2010 hingga 2016. IPSP berisi rencana dan strategi yang disusun oleh AFP untuk memberantas segala bentuk ancaman terhadap keamanan negara dan menciptakan kembali situasi damai dan stabil bagi negara, diantaranya :

1. Berkontribusi pada penutupan permanen dan damai pada semua konflik bersenjata.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena dampak konflik.
3. Pelaksanaan operasi militer terfokus terhadap kelompok ancaman bersenjata AFP dan siap melakukan operasi militer terhadap semua internal kelompok-kelompok ancaman bersenjata yang mengancam keamanan dan kesejahteraan rakyat.

2. *Upaya Eksternal*

a. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Filipina tahun 2012.

Selanjutnya selain upaya internal, pemerintah Filipina sebelumnya juga telah melakukan upaya eksternal dalam menanggapi beberapa kasus terorisme dengan membentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina. Implementasi kerjasama militer dari MoU bidang pertahanan ke dua negara dalam rangka meningkatkan kerjasama militer pada tanggal 10 Desember 2012 di Davao Filipina telah ditandatangani *The Joint Understanding between the Indonesian National Defense Forces (TNI) and the Armed Forces of the Philippines (AFP) on the Philippines-Indonesia Military Cooperation* (Philindo MC) oleh Panglima TNI Jend. Moeldoko dan General Emanuel Trinidad Bautista kepala Angkatan Bersenjata kedua Negara.

Dari kerjasama yang telah dilaksanakan oleh kedua negara Indonesia dan Filipina di perairan Davao dan Laut Sulawesi, Patkor Philindo belum bisa melaksanakan penanggulangan perompakan di sekitar perairan Kepulauan

Sulu karena selain area operasinya tidak mencakup perairan kepulauan Sulu yang merupakan wilayah kedaulatan Filipina, ditambah korban penculikan tidak hanya mencakup wilayah perairan antara Indonesia dan Filipina saja, tetapi korban juga banyak diculik di perairan Sabah-Malaysia. Selain itu juga belum ada payung hukumnya untuk menanggulangi perompakan secara bersama di sekitar perairan tersebut sehingga kerjasama ini belum cukup berhasil.

- b. Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina tahun 2016.
Aksi kejahatan pembajakan dan penculikan yang telah dilakukan oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf, telah merugikan berbagai pihak baik pemerintahan maupun masyarakat Filipina, bahkan kerap juga dirasakan oleh negara-negara lain khususnya Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara tetangga dengan posisi perairan yang sangat strategis bagi kelompok Abu Sayyaf melancarkan aksi pembajakan dan penculikan tersebut terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan Sulu sebagai perairan yang berbatasan langsung antar ketiga negara.

Hingga pada awal tahun 2016, tepatnya pada tanggal 26 Maret terjadi kasus pembajakan yang menimpa anak buah kapal Indonesia dengan jumlah korban 10 orang dengan meminta uang tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14 – 15 miliar dengan tenggat waktu 31 Maret 2016. Kemudian disusul penculikan yang terjadi lagi pada tanggal 1 April 2016 dengan jumlah korban 3 orang ABK WNI. Hal ini tentu sangat merugikan negara Indonesia dan juga negara-negara yang sering tertimpa penculikan disertai pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf, sehingga ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk berinisiatif melakukan pertemuan trilateral untuk membahas upaya pengamanan wilayah perairan perbatasan ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta dan menghasilkan *Joint Declaration* dalam 4 poin kesepakatan, diantaranya:

1. Melakukan patroli di antara ketiga negara.
2. Melakukan *Quick Respond*.
3. Membentuk *National Vocal Point*.
4. Membentuk *Hotline Communication*.

Satu bulan setelah pertemuan di Yogyakarta digelar, kemudian diadakan lagi pertemuan kedua di Manila-Filipina tanggal 20 Juni 2016. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk *Joint Statement*. Dalam kesepakatan tersebut berisi tentang perluasan dari kesepakatan sebelumnya (*Joint Declaration*), yaitu :

- a. Kegiatan terkoordinasi antara militer ketiga negara, fokus pada keamanan maritim;
- b. Kemungkinan untuk membentuk pos komando militer bersama di lokasi yang ditunjuk termasuk penghubung pasukan militer khusus di kapal;
- c. Trilateral maritim dan patroli udara di daerah perhatian bersama;
- d. Kelompok Kerja Patroli Maritim Trilateral (TMPWG) yang akan mengatur arah operasional pelaksana trilateral patroli maritim. Pusat Komando Maritim

- ditetapkan oleh masing-masing negara dan harus memegang tanggung jawab secara keseluruhan untuk tugas dan penerapan aset masing-masing;
- e. Sebuah koridor transit di wilayah maritim yang menjadi perhatian umum yang akan berfungsi sebagai jalur laut yang ditunjuk untuk pelaut yang memasuki area maritim menjadi perhatian bersama;
 - f. Informasi dan pembagian intelejen yang berkaitan dengan daerah maritim menjadi perhatian bersama;
 - g. Berbagi mekanisme database trilateral.

Namun hingga awal tahun 2017, kerjasama ini belum juga terlaksana, banyaknya hambatan permasalahan melatarbelakangi proses kerjasama terkendala, mulai dari permasalahan sengketa perbatasan Sabah antara Malaysia dengan kesultanan Sulu, kemudian rumitnya penentuan tempat untuk upacara peresmian *Maritime Command Center*, hal ini mendorong pemindahan tempat untuk peluncuran patroli maritim trilateral dari Subang - Malaysia, ke Tarakan - Indonesia, menyebabkan penundaan dua bulan, dari peluncuran April 2017 yang semula diusulkan menjadi bulan Juni 2017. Kemudian pecahnya pertempuran di Marawi pada tanggal 23 Mei 2017, terjadi baku tembak antara pasukan pemerintah Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon yang berafiliasi dengan kelompok Maute bersaudara yang dipimpin oleh Omar dan Abdullah serta perbedaan sistem hukum ketiga negara dalam menanggulangi terorisme.

Sehingga pecahnya pertempuran di Marawi tersebut membuat para anggota kelompok teroris Abu Sayyaf merubah arah fokus kejahatan yang mereka lakukan dari kegiatan perompakan di perairan perbatasan, harus rela bertaruh nyawa melawan pasukan Filipina di Marawi, ini menjadikan faktor menurunnya aktivitas penculikan di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban penculikan di bulan Januari yang menimpa warga negara Indonesia di perairan Sabah. Hal ini pula yang sekaligus mendorong agar kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina pun segera terlaksana.

Implementasi Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam menanggulangi Kelompok Teroris Abu Sayyaf

- a. Patroli Laut
Patroli laut bersama dilaksanakan dalam bentuk *Maritime Command Center* (MCC) pada tanggal 19 Juni 2017 yang dilakukan di Tarakan yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara. Setiap negara bagian akan melakukan patroli sendiri di dalam perbatasannya bersama dengan pasukan militer negaranya masing-masing. Kapal-kapal ini akan berpatroli didalam wilayah perbatasannya masing-masing dan harus berada pada keadaan kesiapan konstan untuk bereaksi terhadap keadaan darurat di perairan lokasi penculikan. Patroli ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menggunakan kapal perang dari masing-masing negara diantaranya KRI Sidat-851 dari Indonesia, KD Baung-3509 dari Malaysia dan BRP General Mariano Alvarez dari Filipina.
- b. Patroli udara
Selain itu, Indonesia Malaysia dan Filipina pada tanggal 12 Oktober 2017 juga telah melaksanakan patroli udara di Air Force Base, Subang, Malaysia. Diketahui dalam patroli yang dilaksanakan di Subang, Malaysia ini yang juga merupakan

Malaysia sebagai tuan rumah akan memimpin patroli ini terlebih dulu dengan mengerahkan pesawat Angkatan Udara Kerajaan Malaysia kemudian Filipina dan Indonesia akan mengikutinya. Yang pertama adalah penerbangan bulanan dengan masing-masing negara peserta bergantian menyumbang pesawat. Malaysia akan memulai patroli bersama dengan penerbangan pada bulan November, diikuti oleh Filipina pada bulan Desember dan Indonesia pada Januari 2018. Malaysia mengoperasikan sepasang *Beechcraft B200T Super King Airs* yang dipasang untuk patroli maritim, sementara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Laut gabungan memiliki delapan CASA / IPTN CN-235 dan sejumlah kecil patroli maritim dan pesawat pengintai maritim NC-212, kemudian Filipina juga memperoleh pesawat tersebut dalam bentuk *Leased TC-90 (King Air)* dari *Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)*. Kebijakan juga ini dilengkapi dengan kesepakatan operasi pelatihan militer bersama dan patroli udara di perairan maritim dan garis pantai secara teratur di wilayah yang menjadi kekhawatiran bersama. Patroli ini menghabiskan dana yang diperkirakan mencapai 40 miliar dolar A.S setiap tahunnya. Semua informasi pemantauan udara akan disalurkan ke pusat komando militer, dari informasi ini pasukan akan segera menavigasi kapal dan perahu baik di pos kontrol atau di basis operasi depan untuk membuat jalan pintas atau penyelidikan. Untuk penerbangan dilakukan 2 kali dalam sebulan yang dilaksanakan oleh 2 Skadron udara yaitu Skadron 2 dan Skadron 5, namun untuk jadwalnya penerbangannya bersifat rahasia.

c. Melakukan *Quick Respond*

Peresmian patroli terkoordinasi *Maritime Command Center*, juga ditandai dengan demonstrasi *Indomalphi Quick Response*, yaitu memberi bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan daerah perhatian bersama. Kemudian ketiga negara juga sepakat bahwa personil militer diizinkan untuk melintasi perbatasan untuk mengejar penculik atau teroris. Namun, dalam peraturan pencarian ini cukup ketat, mereka hanya diperbolehkan dalam situasi darurat dan harus dilakukan dengan pengetahuan sebelumnya dari pihak yang dilanggar. Selain itu, untuk saat ini, mereka hanya menjangkau wilayah maritim dan tidak mencakup operasi berbasis lahan atau darat, walaupun negara-negara tersebut setuju untuk menjelajahnya di masa depan.

d. Membentuk pos komando maritim

Pembentukan tiga pos komando adalah untuk memfasilitasi koordinasi, antara lain: Bongao di Filipina, Tawau di Malaysia, dan Tarakan di Indonesia. Pos-pos tersebut akan digunakan untuk menunjukkan rute laut dan pengawasan udara, ketiga negara juga menyepakati latihan angkatan laut bersama.

Dengan terbentuknya rute patroli maritim ini upaya untuk menurunkan angka kriminalitas di Laut Sulawesi-Laut Sulu dapat tercapai karena adanya kesepakatan prosedur standar *hot pursuit* dan tindakan dalam keadaan normal dengan patroli terkoordinasi lewat pertukaran informasi secara cepat dalam situasi darurat, misalnya dengan membuat *hotline* saluran informasi atau pengaduan demi meningkatkan koordinasi bantuan untuk orang dan kapal dalam situasi kritis serta mengintensifkan informasi, intelijen dan komunikasi bersama pembahasan standar operasional prosedur yang jelas dan detail pada setiap tahapan yang akan dibahas

masing-masing menteri luar negeri dan panglima militer, juga untuk mengetahui perkembangan terorisme yang terjadi di negara masing-masing sehingga ketiga negara dapat melihat keterkaitan jaringan terorisme.

- e. Kelompok kerja patroli maritim
Pembagian kelompok kerja patroli maritim yaitu mengatur arah operasional pelaksana trilateral patroli maritim. Pusat Komando Maritim ditetapkan oleh masing-masing negara dan harus memegang tanggung jawab secara keseluruhan untuk tugas dan penerapan aset masing-masing yang dimaksudkan, adalah telah dilakukan pembagian tugas masing-masing yang berjaga di pos komando, kapal laut, dan pesawat udara yang akan dilakukan oleh peserta aparat dari masing-masing negara.
- f. Koridor transit di wilayah maritim sebagai jalur laut.
Jalur koridor transit di lokasi yang ditunjuk merupakan jalur yang sama dengan pos komando yaitu Tarakan, Tawau dan Bongao. Namun Pada bulan Juli, Indonesia dan Filipina menciptakan rute pelayaran baru yang menghubungkan kota-kota Davao, General Santos dan Provinsi Sulawesi Utara. Dengan ditetapkannya jalur aman yang ditunjuk bagi pelayaran niaga atau koridor transit bagi kapal-kapal ketiga negara agar terhindar dari peristiwa perompakan, selain itu juga sebagai kegiatan komersial bagi kapal nelayan atau perusahaan yang ingin beristirahat ataupun mengisi bahan bakar.
- g. Informasi dan pembagian intelejen, serta berbagi mekanisme database trilateral.
Pelaksanaan pertukaran informasi dan database trilateral yaitu dengan melakukan *exchange* delegasi oleh aparat perwakilan peserta pelaksana patroli trilateral dari masing-masing negara akan bertemu di pos komando yang ditetapkan dan juga bersifat rahasia. Jadi dalam pertemuan tersebut akan dilampirkan berupa laporan tertulis berserta dengan foto-foto yang telah didapat.
- h. Membentuk *Hotline Communication*
Pada kesepakatan pembentukan saluran komunikasi ini dimaksudkan agar membentuk jaringan komunikasi yang memudahkan pelaut yang mengalami situasi kritis dapat direspon secara cepat oleh aparat pemerintahan yang bertugas, namun fakta yang terjadi dilapangan, untuk melayani masyarakat lokal masih belum terakomodir untuk jalur pelaporan sehingga untuk sementara aparat yang bertugas dibantu oleh pihak intel untuk berkomunikasi ataupun mendapatkan informasi mengenai situasi yang terjadi laut maupun darat.

Dalam proses menghilangkan kelompok teroris yang sudah cukup lama berada di perairan tiga negara merupakan hal yang tidak mudah sehingga kerjasama ini tidak lepas dari hambatan dan tantangan. Untuk hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kerjasama yang telah berjalan ini antara lain, diakui cukup sulit untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam implementasi kerjasama melihat perbedaan sistem hukum antar ketiga negara, hal ini dibuktikan dari panjangnya proses kesepakatan.

Kemudian permasalahan yang menjadi hambatan ialah meningkatnya serangan terorisme yang terjadi di Marawi sehingga ini menjadi sebab kerjasama trilateral yang awalnya fokus terhadap keamanan perairan maritim meluas hingga yang nanti akan direncanakan operasi darat di wilayah Filipina. Ditambah permasalahan sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dengan kesultanan Sulu-Filipina yang belum terselesaikan, sehingga ini menyebabkan sulitnya menentukan batas wilayah patroli yang akan dilakukan pasukan keamanan Malaysia dengan Filipina.

Selanjutnya terdapat pula tantangan dalam proses berlangsungnya implementasi kerjasama ini yaitu agar ketiga negara dapat menjalankan kerjasama penanggulangan terorisme ini dengan baik sehingga segala aksi perompakan bersenjata di kawasan tiga negara tidak dapat terjadi lagi, selain itu juga agar kesepakatan *hotline communication* yang berguna memudahkan para pelaut untuk dapat langsung menghubungi aparat keamanan militer segera di laksanakan, sehingga bertujuan memudahkan para korban sandera dapat langsung diketahui dan dideteksi keberadaannya secara cepat dan tanggap oleh aparat keamanan militer yang bertugas dikarenakan untuk sementara ini *hotline communication* masih berkerjasama dengan pihak intel dari kepolisian. Ditambah lagi, di tengah meningkatnya minat mitra eksternal untuk berkontribusi pada kerja sama trilateral yang sedang berkembang ini dapat ditanggapi dengan bijak agar ketiga negara dapat mengoperasionalkan upaya-upaya kerjasama mereka terlebih dahulu sebelum mengizinkan mitra lain untuk dilibatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis lalu dituangkan dalam bab-bab sebelumnya tentang implementasi kerjasama trilateral Indonesia Malaysia Filipina dalam menanggulangi kelompok teroris Abu Sayyaf di perairan perbatasan ketiga negara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil implementasi dari 7 poin kesepakatan kerjasama tersebut dapat dikatakan sudah cukup efektif karena dari 7 program kerja tersebut semuanya saling terintegrasi dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan. Hal ini dilihat dari poin-poin kerjasama yang telah terlaksana dan penurunan jumlah sandera seiring meningkatnya pertempuran di Marawi dari data di tahun 2017 yang hanya terdapat 3 korban sandera, angka ini tentu sangat menurun jika dibandingkan penculikan yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 48 korban sandera. Namun, kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal ketiga negara anggota ASEAN dapat terus memperbaiki kekurangan yang ada dalam menanggulangi terorisme yang berkembang di Asia Tenggara, sehingga kerjasama ini dapat terus berjalan lebih baik lagi di masa depan.

Saran

- a. Diharapkan kepada masing-masing pemerintahan Indonesia, Malaysia dan Filipina agar melakukan sosialisasi secara meluas terhadap setiap kalangan masyarakat yang ingin melewati perairan perbatasan antara ketiga negara agar mengetahui informasi jalur-jalur aman mana saja yang dapat dilalui oleh para pelaut sehingga terhindar dari wilayah rawan penculikan.

- b. Diharapkan pula agar ketiga negara dapat lebih fokus lagi dalam menjalankan strategi kerjasama yang telah disepakati oleh ketiga negara sehingga hambatan-hambatan yang telah dihadapi.
- c. Selanjutnya diharapkan untuk pemerintah Filipina agar memberikan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan hingga pembangunan yang memadai secara merata bagi masyarakat Filipina Selatan.

Daftar Pustaka

Buku

Barry Buzan dkk., *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*, 1990, London:Pinter

Maltz, Michael. *On Defining Organized Crime*, dalam *crime and Delinquency*, 1976.

Mueller, Gerhard O. W. "*Transnational Crime: Definitions and Concepts*", 1998, *Transnational Organized Crime*.

Jurnal

Abuza, Zachary, "*Balik-Terrorism : The Return of the Abu Sayyaf*", September 2005, hal 2, *Strategic Studies Institute*,
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/pub625.pdf>.

Amnesty International,"*The Battle Of Marawi death and destruction in the Philippines*", diakses di
https://www.amnesty.lu/uploads/media/THE_BATTLE_OF_MARAWI.PDF.

ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES INTERNAL PEACE AND SECURITY PLAN, "*Internal Peace and Security Plan*", diakses di
<http://www.army.mil.ph/home/images/bayanihan.pdf>.

Atkinson, Garrett "*Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman A review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines*",*March* 2012, hal 4, *Perspective Journal of American Security Project*, diakses di
<http://americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf>.

Ghofur, Abdul"*DINAMIKA MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN DAN GERAKAN SPARATIS ABU SAYYAF*", diakses di
<https://media.neliti.com/media/publications/164432-ID-dinamika-muslim-moro-di-filipina-selatan.pdf>.

JOINT STATEMENT, “*TRILATERAL MEETING ON SECURITY AMONG THE PHILIPPINES, INDONESIA, AND MALAYSIA*”, diakses di <https://dfa.gov.ph/newsroom/statements-and-advisories/13060-joint-statement-trilateral-meeting-on-security-among-the-philippines-indonesia-and-malaysia>

Kemlu, “*Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia Malaysia-Philippines*”, 5 Mei 2016, diakses di <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-Declaration-Foreign-Ministers-and-Chiefs-of-Defence-Forces-of-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx>.

Muladi, “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*”, 2002, Jakarta, The Habibie Center.

Namora, Giuliani Agustha, “*Peran ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM dalam penanganan terorisme di Filipina periode 2011 – 2013*” diakses <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/13529>.

Pujayanti, Adirini, “*Upaya pembebasan WNI sandera Abu Sayyaf*” diakses di http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-16.pdf.

Putri, Anggalia, “*Abu Sayyaf Group dan Faktor-Faktor Penyebab kemunculannya pendekatan Strategic Relational dan Rational-Choice*” diakses di https://www.academia.edu/6087867/Faktor-Faktor_Kemunculan_Abu_Sayyaf_Group

Media Online

Annual Report Piracy and armed robbery againsts ship in Asia 2016, diakses di https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/Hadyu-Ikram_iIndonesia-Malaysia-Philippines-Cooperation-in-Combating-Mar.pdf.

Divianta, Dewi, “*Pertemuan 3 ‘Negara’ di Bali Membahas Keamanan Laut Sulu*”, 2 Agustus 2016, <http://global.liputan6.com/read/2567141/pertemuan-3-negara-di-bali-membahas-keamanan-laut-sulu>.

Nirmala, Rona, ” *Berakhirnya pertempuran melawan teroris di Marawi*”, diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/berakhirnya-pertempuran-melawan-teroris-di-marawi>.

Parameswaran, Prashanth “*New Sulu Sea Trilateral Patrols Officially Launched in Indonesia*”, diakses di <http://thediplomat.com/2016/08/new-sulusea-trilateral-patrols-officially-launched/>.

Kuwado, Fabian Januarius, “*Indonesia-Malaysia-Filipina Sepakati "Trilateral Air Patrol" di Laut Sulu*”, diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-filipina-sepakati-trilateral-air-patrol-di-laut-sulu>.

Wiranto, Surya, SH MH, “*Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina (Bagian I)*”, diakses di <http://maritimnews.com/upaya-atasi-perompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-i/> .

Yeo, Mike,”*Malaysia, Indonesia dan Filipina menargetkan ISIS dalam patroli udara trilateral*”, diakses di <https://www.defensenews.com/naval/2017/10/13/malaysia-indonesia-and-philippines-target-isis-in-trilateral-air-patrols/>.